



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun
2022

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Nias Selatan**



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung pencapaian visi misi Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

Secara garis besar dokumen LKjIP Bappeda Kabupaten Nias Selatan menyajikan perencanaan kinerja dan pencapaian target, faktor-faktor yang merupakan keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2022 serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami berharap LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Teluk Dalam, 21 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Nias Selatan,



ABDIEL SONASA AMAZIHONO, SSTP.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19830826 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menjabarkan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan selama 1 (satu) tahun dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selain itu Laporan ini juga memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Capaian indikator kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	20%	23%	115%
Persentase SOP yang diterapkan	100%	100%	100%
Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	70%	67%	96%
Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	10%	19%	190%
Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	50%	74%	147%
Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat diartikan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 telah mencapai target. Dari 6 indikator yang ada , 5 diantaranya tercapai $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan dan 1 indikator $\leq 100\%$ yang disebabkan pengurangan pelaksanaan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagai imbas dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3.1.Kedudukan.....	2
1.3.2.Tugas	2
1.3.3.Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia.....	6
1.6 Sarana dan Prasarana.....	6
1.7 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2021 - 2026.....	9
2.2 Visi dan Misi	9
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	9
2.3.1 Tujuan.....	9
2.3.2 Sasaran	10
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
2.5 Perjanjian Kinerja.....	11
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Aset Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	6
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026.....	11
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	15
Tabel 3.3. Standar Operasional Prosedur Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	17
Tabel 3.4. Tabel Usulan Musrenbang Desa Yang Terakomodir Dalam RKPD.....	18
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....	20
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Kondisi SDM Bappeda Kabupaten Nias Selatan..... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola pemerintahan. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tujuan dari pelaporan kinerja adalah :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2. Tugas

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

1.3.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembang;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, dan di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1.4 Struktur Organisasi

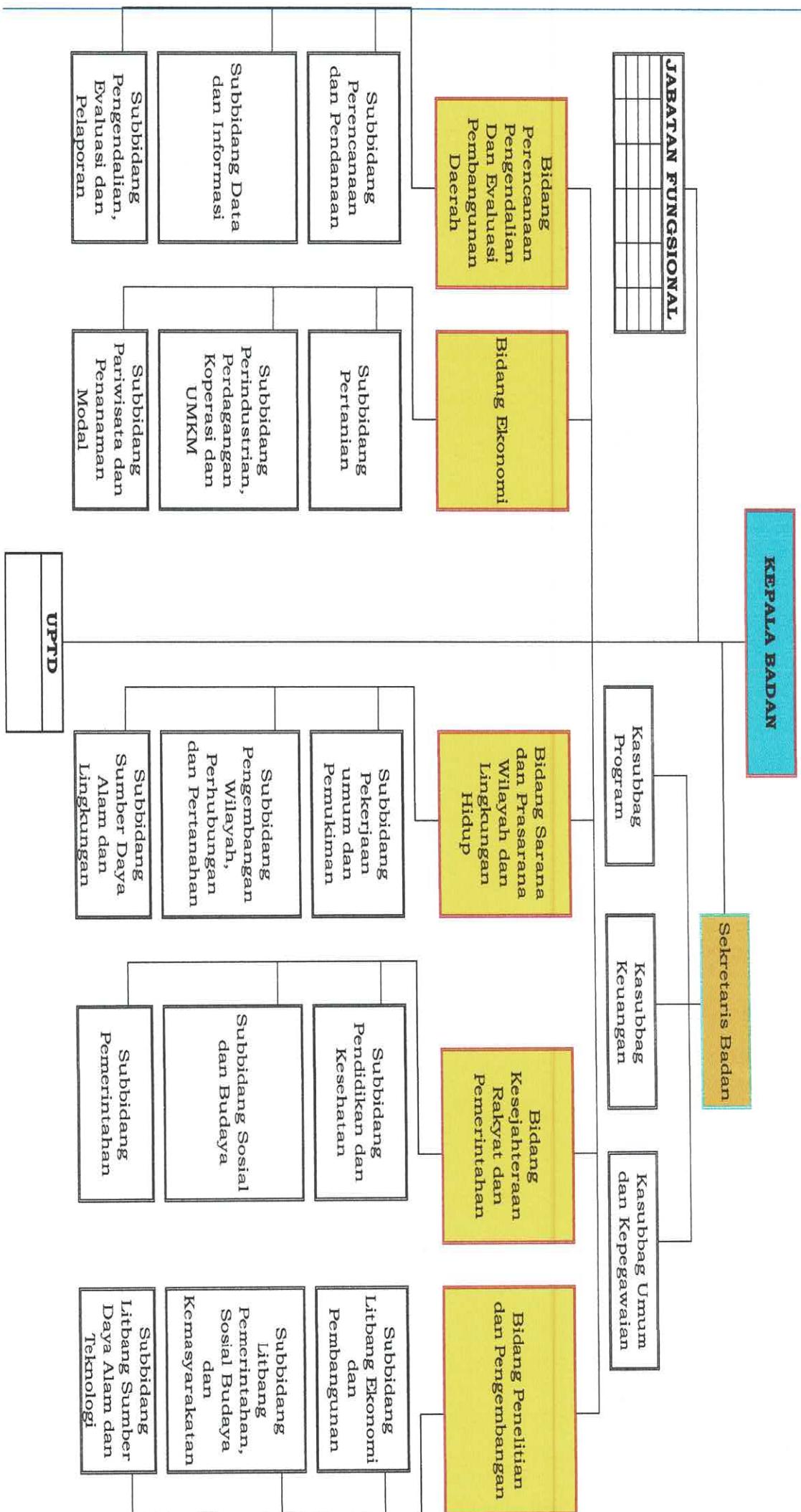
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 3. Sub Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- f. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan.

- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Litbang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
 - 3. Sub Bidang Litbang Sumber Daya Alam dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari uraian susunan organisasi diatas maka struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan



1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022 jumlah pegawai Bappeda 41 orang yang terdiri dari 30 orang ASN dan 11 orang pegawai tidak tetap. Daftar ASN Bappeda Kabupaten Nias Selatan secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

1.6 Sarana dan Prasarana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi. Berdasarkan laporan asset Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada akhir tahun 2022 secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang pencapaian kinerja telah cukup memadai. Adapun daftar sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Daftar Aset Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Pompa air bersih	1	Buah
2	Kendaraan Roda Empat	1	Unit
3	Kendaraan Roda Dua	5	Unit
4	Global Positioning System	4	Unit
5	Mesin Hitung Uang	1	Buah
6	Lemari	30	Buah
7	CCTV	1	Set
8	LCD	2	Buah
9	Kursi	301	Buah
10	Jam Dinding	1	Buah
11	Pendingin Ruang (AC)	18	Buah
12	Kipas Angin	8	Buah

No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan
13	Amplifier	2	Buah
14	Meja	40	Buah
15	Genset	1	Buah
16	PC/Komputer	13	Unit
17	Laptop	18	Unit
18	Printer	23	Unit

1.7 Isu Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dengan Kepres Nomor 27 tahun 1980, serta Peraturan Daerah Nias Selatan tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang mempunyai tugas membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam perencanaan starategis pembangunan daerah mempunyai posisi yang sangat strategis, terutama dalam mengkoordinasikan, menyelaraskan serta mensinergikan seluruh perencanaan baik antara seluruh Perangkat Daerah di dalam jajaran pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi serta program pembangunan regional dan nasional baik dananya yang bersumber dari DAU/APBD, APBD Provinsi, dana dekonsentrasi (APBN), dana alokasi khusus (DAK), Dana Bagi Hasil maupun sumber-sumber dana lainnya.

Berdasarkan telaah terhadap visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Daerah, Renstra Provinsi, dokumen RTRW dan KLHS maka dirumuskan beberapa isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan untuk periode 2021 – 2026, yaitu :

- a. Ketersediaan data dan informasi pembangunan;
- b. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Kualitas dan kompetensi SDM perencana
- d. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran

Selain isu-isu strategis yang menyangkut perencanaan pembangunan, kenyataan dilapangan menunjukkan ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu, antara lain (i) pola pikir dan budaya kerja sendiri-sendiri; (ii) masih terdapat rangkap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga teknis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan 2021 – 2026 memuat Visi dan Misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Renstra tersebut menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang disesuaikan dengan perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.2 Visi dan Misi

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026, visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah “ **Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera** ”. Visi tersebut dimanifestasikan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu :

- 1) Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;
- 2) Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
- 4) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif;
- 5) Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka watu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 mengacu pada tujuan yang termuat pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu :

- **Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel.**
- **Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah**

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah:

- **Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana**
- **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**
- **Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan**

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana**
Strategi :
 - Memberikan kesempatan kepada SDM perencana untuk mengembangkan kualitas dan kompetensinya;
 - Melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur Bappeda.
Arah Kebijakan :
 - Pendidikan dan pelatihan perencanaan baik formal maupun non formal;
 - Penerapan SOP terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**
Strategi :
 - Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah

Arah Kebijakan :

- Optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi;
- Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Optimalisasi proses asistensi, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Focus Group Discussion (FGD)

➤ **Sasaran 3 : Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan Strategi :**

- Menyediakan dokumen kajian dan penelitian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Arah Kebijakan :

- Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan berbasis data

2.5 Perjanjian Kinerja

Dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2026 maka Bappeda Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa sasaran strategis yang dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Lakip	Predikat	CC	B	B	B	B	
	1.1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	Persen	20	20	20	20	20	
2.	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	Pengabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	80	90	100	100	100	
	2.1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	70	80	90	100	100	
2.2.		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	Persen	10	15	20	25	30	
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	Persen	50	55	60	65	70	
	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	Persen	100	100	100	100	100	

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Dalam menetapkan Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022, Bappeda Kabupaten menyusun pohon kinerja sebagai alat bantu dalam menganalisa pencapaian target Indikator Kinerja Utama. Pohon kinerja memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah yang didukung oleh Eselon III, Eselon IV dan seluruh staf. Berdasarkan pohon kinerja yang telah disusun maka rencana aksi Bappeda Kabupaten Nias Selatan ditetapkan sebagaimana terlampir pada dokumen ini. Sebagai komitmen seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai target indikator kinerja utama dan menjamin terlaksananya rencana aksi maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	20%
		Persentase SOP yang diterapkan	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	70%
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	10%
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	50%
3	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	100%

2.6 Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan, dengan berpedoman kepada arah kebijakan yang telah ditetapkan maka perlu implementasi yang diuangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang sistematis terpadu dan terarah. Implementasi rencana kerja tahunan Bappeda Kabupaten Nias Selatan dan perubahannya dapat dilihat pada Tabel terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dengan realisasinya.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 berdasarkan penetapan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	20%	23%	115%
		Persentase SOP yang diterapkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	70%	67%	96%
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	10%	19%	190%
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	50%	74%	147%
3	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	100%	100%	100%

Evaluasi dan Analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 1, ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang digunakan yaitu :

1) Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis

Target yang ditetapkan untuk mencapai indicator adalah 20% dan terealisasi 23%. Jika realisasi dibandingkan dengan target maka capaian kinerja adalah 115% termasuk kriteria sangat tinggi. Rumus pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase ASN yg mengikuti diklat teknis} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis}}{\text{jumlah seluruh ASN Bappeda}} \times 100\% \\
 &= \frac{7}{30} \times 100\% \\
 &= 23\%
 \end{aligned}$$

Pada Tahun 2022 jumlah ASN Bappeda Kabupaten Nias Selatan adalah 30 orang dan terdapat 7 orang yang mengikuti diklat teknis tentang penggunaan aplikasi Simda Fmis (4 orang) dan aplikasi Puja Indah (3 orang).

Manfaat dari keikutsertaan pada Diklat teknis :

a. Aplikasi Simda Fmis

Menghasilkan ASN Bappeda yang terampil dalam mengoperasikan aplikasi Simda Fmis sehingga perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Bappeda Kabupaten Nias Selatan lebih efektif, efisien dan tepat waktu.

b. Aplikasi Puja Indah

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terkait dengan Inovasi Daerah terhadap peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan *Internet Of Things* maka Pemerintah Daerah memanfaatkan *Platform Puja Indah* yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memicu individu maupun perangkat daerah dalam menciptakan inovasi untuk pencapaian target kinerja daerah.

2) Persentase SOP yang diterapkan

Target yang ditetapkan pada indicator ini adalah 100% dan terealisasi 100%. Jika target dibandingkan dengan realisasi maka pencapaian indicator termasuk kategori sangat tinggi. Rumus pencapaian target adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase SOP yang diterapkan} &= \frac{\text{Jumlah SOP yang diterapkan}}{\text{jumlah SOP yang tersedia}} \times 100\% \\
 &= \frac{22}{22} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Adapun Standar Operasional Prosedur yang tersedia di Bappeda Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Standar Operasional Prosedur Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Jenis SOP	Diterapkan	
		Ya	Tidak
1	SOP Rapat	✓	
2	SOP Pengelolaan BMD	✓	
3	SOP Laporan Keuangan	✓	
4	SOP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	✓	
5	SOP Evaluasi	✓	
6	SOP Renstra Internal	✓	
7	SOP Renja Internal	✓	
8	SOP Penyusunan DPA	✓	
9	SOP Penyusunan RKA	✓	
10	SOP Surat Keluar	✓	
11	SOP Surat Masuk	✓	
12	SOP Peminjaman Barang Milik Daerah (BMD)	✓	
13	SOP Penyusunan RPJPD	✓	
14	SOP Penyusunan RPJMD	✓	
15	SOP Penyusunan Renstra SKPD	✓	
16	SOP Penyusunan RKPD	✓	
17	SOP Penyusunan Renja	✓	
18	SOP Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	✓	
19	SOP Pengendalian dan Evaluasi Renstra	✓	
20	SOP Pengendalian dan Evaluasi RKPD	✓	
21	SOP Pelaksanaan Musrenbang	✓	
22	SOP Perencanaan Infrastruktur	✓	
Total		22	

Manfaat penerapan SOP di Bappeda adalah:

- Aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dapat dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan
- Tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas berkurang;
- Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan meningkat;
- Aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- Akuntabilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas meningkat.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, Indikator Kinerja yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD

Target Indicator kinerja yang ditetapkan pada konsistensi sub kegiatan RKPD kedalam APBD sebesar 70%. Capaian kinerja yang dihasilkan pada akhir tahun 2022 terealisasi sebesar 67% dengan persentase capaian kinerja sebesar 96% kategori “sangat tinggi”. Pencapaian kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Di dalam RKPD Tahun 2022 terdapat 2.253 sub kegiatan sedangkan setelah pengesahan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 jumlah sub kegiatan yang konsisten dari RKPD hingga ke APBD Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 1.515 sub kegiatan (Rekap konsistensi sub kegiatan terlampir). Rumus pencapaian target adalah sebagai berikut:

$$\text{Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD} = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan APBD yang dilaksanakan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah sub kegiatan RKPD tahun berkenaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1515}{2253} \times 100\%$$

$$= 67\%$$

- 2) Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD

Pada perjanjian kinerja target yang ditetapkan untuk indicator ini adalah 10% dan terealisasi 19%. Jika target di bandingkan dengan realisasi maka capaian kinerja termasuk sangat tinggi yaitu 190%.

Tabel 3.4.

Tabel Usulan Musrenbang Desa Yang Terakomodir Dalam RKPD

Usulan	Diakomodir	Tidak Diakomodir
Musrenbang Desa	1217	
Validasi Mitra Bappeda	1215	2
Musrenbang Kecamatan	663	552
Forum SKPD	273	390
Musrenbang Kabupaten	227	46

Berdasarkan Tabel 2.6 pada Tahun 2022 terdapat 1217 usulan musrenbang desa yang di input dalam aplikasi SIPD, setelah melewati

tahapan validasi oleh mitra Bappeda, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten maka usulan yang terakomodir dalam RKPD hanya 227 usulan. Dengan demikian rumusan pencapaian target untuk indicator usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD adalah :

$$\text{Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD} = \frac{\text{Jumlah usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD}}{\text{jumlah seluruh usulan desa}} \times 100\%$$
$$= \frac{227}{1217} \times 100\%$$
$$= 19\%$$

- 3) Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa
- Target yang ditetapkan untuk mencapai indikator adalah 50% dan terealisasi 74%. Jika target dibandingkan dengan realisasi maka capaian kinerja adalah 147% atau termasuk kategori pencapaian kinerja sangat tinggi. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan berita acara dan usulan yang terinput pada aplikasi SIPD Tahun 2022, dari 459 desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan, yang melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat desa sebanyak 338 desa. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa} = \frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa}}{\text{jumlah seluruh desa}} \times 100\%$$
$$= \frac{338}{459} \times 100\%$$
$$= 74\%$$

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan

Meningkatnya hasil kajian penelitian diukur melalui indicator persentase implementasi rencana kelitbangan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 100%. Jika target dibandingkan dengan realisasi maka pencapaian target termasuk kategori sangat tinggi yakni

100%. Pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pada Tahun 2022 terdapat 2 kelitbang yang direncanakan yakni :

1. Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
2. Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif.

Dari perencanaan tersebut, Bappeda Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti 2 kelitbang Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase implementasi rencana kelitbang} &= \frac{\text{Jumlah kelitbang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbang dalam renja Perangkat Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	Persen	20	23	n/a
		Persentase SOP yang diterapkan	Persen	100	100	n/a
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	70	67	83
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	Persen	10	19	4
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	Persen	50	74	50
3	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	Persen	100	100	n/a

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana

Membandingkan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya maka terdapat perbedaan dari sisi sasaran, indikator maupun target

sehingga data pada tahun 2021 belum tersedia (n/a). Hal ini disebabkan realisasi tahun 2021 merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sedangkan realisasi tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2021-2026.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Membandingkan realisasi 3 indikator yang mendukung sasaran strategi 2 pada tahun 2022 dengan tahun 2021 :

- a. Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD

Tahun 2021 indikator terealisasi 83% atau lebih tinggi dari tahun 2022 yakni hanya 67%.

- b. Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD

Realisasi tahun 2021 4% lebih rendah dari realisasi tahun 2022 19% yang disebabkan usulan musrenbang desa pada tahun 2021 masih secara manual atau belum diinput kedalam aplikasi SIPD.

- c. Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa

Realisasi tahun 2021 50% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 74%, hal ini disebabkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan

Membandingkan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya maka target pada tahun 2021 belum tersedia (n/a) hal ini disebabkan karena sasaran strategis 3 tidak menjadi sasaran pelaksanaan Renstra periode 2016 -2021.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra (2026)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	Persen	20	23	100
		Persentase SOP yang diterapkan	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	70	67	100
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	Persen	10	19	30
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	Persen	50	74	70
3	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	Persen	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 2 indikator kinerja telah terealisasi 100% sesuai dengan target jangka menengah yaitu persentase SOP yang diterapkan dan persentase implementasi rencana kelitbang. Terdapat 1 indikator kinerja yang terealisasi melebihi dari target jangka menengah yaitu persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa sedangkan 3 indikator kinerja lainnya masih perlu dilakukan upaya peningkatan pencapaian kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

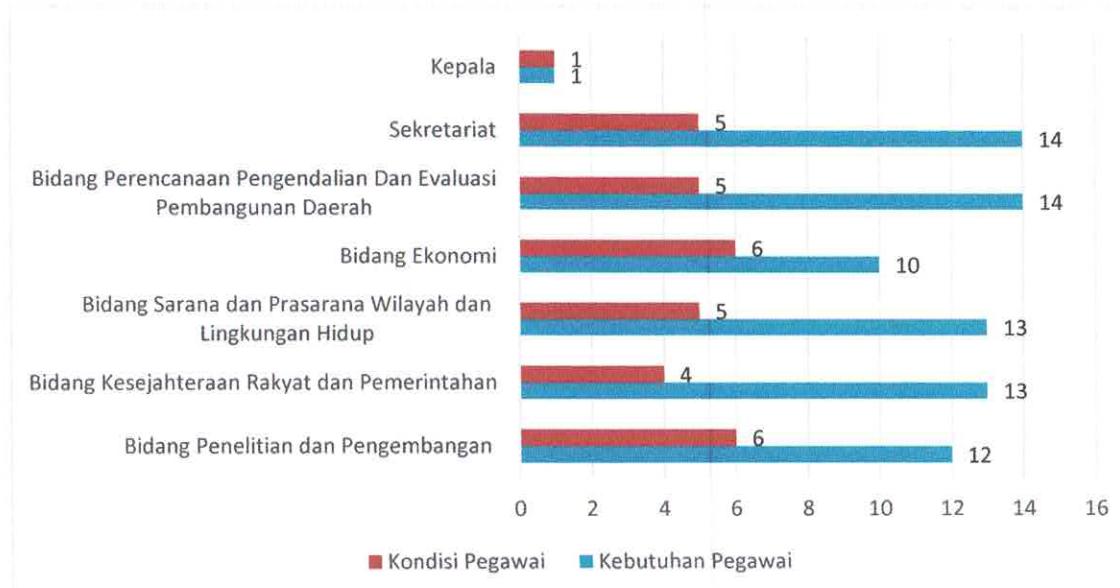
Beberapa faktor yang menyebabkan capaian kinerja termasuk kriteria sangat tinggi adalah :

- a) Perhatian pimpinan unit kerja terhadap pencapaian target organisasi;
- b) Komitmen seluruh staf Bappeda Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

- c) Meningkatnya koordinasi antar bidang, antar Perangkat Daerah;
- d) Regulasi tentang penggunaan aplikasi SIPD.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Grafik 3.1. Kondisi SDM Bappeda Kabupaten Nias Selatan



Bila dilihat pada grafik diatas bahwa kebutuhan pegawai dibandingkan dengan kondisi pegawai di Bappeda masih jauh dari ideal tetapi dengan keterbatasan SDM tersebut Bappeda Kabupaten Nias Selatan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang telah ditetapkan maka perlu implementasi yang dituangkan dalam bentuk program yang sistematis, terpadu dan terarah.

Sasaran Strategi 1 :

Terdapat 1 program yang mendukung sasaran strategis 1 dengan rata-rata capaian kinerja 99%. Keberhasilan terhadap capaian kinerja kegiatan-kegiatan tersebut disebabkan oleh perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sasaran Strategi 2 :

Sasaran strategi 2 didukung oleh 2 program dengan rata-rata capaian kinerja 100%, hal ini disebabkan adanya kerjasama tim dan meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah.

Sasaran Strategi 3 :

Sasaran strategi 3 didukung oleh 1 program dengan rata-rata capaian kinerja 100%, hal ini disebabkan adanya kesadaran menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk menghasilkan persepsi baru dalam perencanaan pengembangan pertanian dan inovasi daerah.

Untuk lebih jelas mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil rencana kerja dalam lampiran dokumen ini.

B. Realisasi Anggaran

Dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 tercatat anggaran sebesar Rp.2.529.673.124,- (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah). Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Nias Selatan tercatat realisasi anggaran sebesar Rp. 2.523.536.422,- (Dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah). Jika dibandingkan antara realisasi dengan pagu anggaran yang tersedia maka realisasi anggaran mencapai 99,76%. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2022 didukung oleh perencanaan dan optimalisasi anggaran yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenan. Untuk lebih jelas mengenai realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capain kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 rata-rata termasuk dalam kriteria penilaian kinerja sangat tinggi;
2. Realisasi pencapaian target tahun 2021 tidak semua dapat dibandingkan dengan realisasi pencapaian target tahun 2022 yang disebabkan oleh karena perbedaan periode pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra);
3. Sumber daya manusia yang terbatas tidak menjadi penghalang dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Koordinasi antar bidang, antar perangkat daerah lebih ditingkatkan dalam mempermudah pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah;
2. Perlu diberikan *reward* terhadap Perangkat Daerah yang memiliki kinerja baik.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK);
2. Tabel Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
3. Tabel Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
4. Tabel Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD;
5. Tabel Penjabaran Konsistensi Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD;
6. Tabel Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2022;
7. Tabel Capaian Target Indicator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
8. Tabel Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022;
9. Tabel Rencana Aksi Perubahan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
10. Pohon Kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan;
11. Daftar ASN Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
12. Foto pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Nias Selatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Saonigeho KM. 3,5 (22865)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP.,M.Ec.Dev**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hilarius Duha, SH., MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,


Dr. Hilarius Duha, SH., MH

Pihak Pertama,


Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19830826 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	20%
		Persentase SOP yang diterapkan	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	70%
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	10%
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	50%
3	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.045.837.462	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 269.246.120	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 153.166.952	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 61.422.590	APBD
Jumlah		Rp 2.529.673.124	

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Bupati Nias Selatan,

Dr. Hilarius Duha, SH., MH

Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan,

Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19830826 200112 1 002

URUSAN	KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Muju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	01	02			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah yang tersusun	Bappeda	2 Dok	25.000.000,00	DAU	2 Dok	25.000.000,00	
5	01	02	2		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen penelaahan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya yang tersusun	Bappeda	2 Dok	25.000.000,00	DAU	2 Dok	25.000.000,00	
5	01	02	2.01	01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersedianya dokumen konsultasi publik untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD	Bappeda	1 Dok.	35.000.000,00	DAU	1 Dok	35.000.000,00	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Pelaksanaan Forum BKPD/Lintas SKPD	Tersedianya dokumen forum BKPD/Lintas SKPD untuk penyusunan RKPD	Bappeda	1 Dok.	35.000.000,00	DAU	1 Dok	35.000.000,00	
5	01	02	2	03	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	1 Dok.	40.000.000,00	DAU	1 Dok	40.000.000,00	
5	01	02	2.01	04	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya bahan usulan Kecamatan	Bappeda	35 Dok	200.000.000,00	DAU	35 Dok	200.000.000,00	
5	01	02	2	05	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen penetapan Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	2 Dok	150.000.000,00	DAU	2 Dok	150.000.000,00	
5	01	02	2.01	06	Analisa Data dan Informasi Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	ada / tidak ada	190.000.000,00	DAU	ada / tidak ada	190.000.000,00	
5	01	02	2.01	07	Analisa Data dan Informasi Perencanaan	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang dianalisa	Bappeda	1 Dok	10.000.000,00	DAU	1 Dok	10.000.000,00	
5	01	02	2.02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya layanan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD secara elektronik	Bappeda	1 Aplikasi	80.000.000,00	DAU	1 Aplikasi	80.000.000,00	
5	01	02	2.02	1	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen profil daerah Kabupaten Nias Selatan	Bappeda	1 Dok	100.000.000,00	DAU	1 Dok	100.000.000,00	
5	01	02	2.02	02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	8 Dok	200.000.000,00	DAU	8 Dok	200.000.000,00	
5	01	02	2.02	03	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah	Bappeda	2 Dok	50.000.000,00	DAU	2 Dok	50.000.000,00	
5	01	02	2.03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang tersusun	Bappeda	6 Dok	150.000.000,00	DAU	6 Dok	150.000.000,00	
5	01	02	2.03	01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGIASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	Bappeda	65%	915.000.000,00	DAU	65%	915.000.000,00	
5	01	02	2.03	03		Percentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	Bappeda	65%		DAU	65%		
5	01	03				Percentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	65%		DAU	65%		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	3 Dok	305.000.000,00	DAU	3 Dok	305.000.000,00	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.01		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen PD bidang Pemerintahan yang diajukan	Bappeda	4 Dok	25.000.000,00	DAU	4 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.01	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitor dan dievaluasi bidang Pemerintahan	Bappeda	63 OPD	35.000.000,00	DAU	63 OPD	35.000.000,00	
5	01	03	2.01	02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.01	04	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen PD bidang Pembangunan manusia yang diajukan	Bappeda	5 Dok	25.000.000,00	DAU	5 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitor dan dievaluasi bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	5 OPD	35.000.000,00	DAU	5 OPD	35.000.000,00	
5	01	03	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	1 Dok	110.000.000,00	DAU	1 Dok	110.000.000,00	
5	01	03	2.01	07	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	Bappeda	2 Dok	305.000.000,00	DAU	2 Dok	305.000.000,00	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen PD bidang Perekonomian yang diajukan	Bappeda	4 Dok	25.000.000,00	DAU	4 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.02	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitor dan dievaluasi bidang Perekonomian	Bappeda	10 OPD	35.000.000,00	DAU	10 OPD	35.000.000,00	
5	01	03	2.02	02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.02	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang SDA	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.02	04	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen PD bidang SDA yang diajukan	Bappeda	5 Dok	25.000.000,00	DAU	5 Dok	25.000.000,00	
5	01	03	2.02	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitor dan dievaluasi bidang SDA	Bappeda	21 OPD	35.000.000,00	DAU	21 OPD	35.000.000,00	
5	01	03	2.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda	1 Dok	110.000.000,00	DAU	1 Dok	110.000.000,00	
5	01	03	2.02	07	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	5 Dok	305.000.000,00	DAU	5 Dok	305.000.000,00	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya dokumen (RPJPD,RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00
5	01	03	2.03		Amistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen PD bidang Infrastruktur yang diinisiasi	Bappeda	4 Dok	25.000.000,00	DAU	4 Dok	25.000.000,00
5	01	03	2.03	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	Bappeda	8 OPD	35.000.000,00	DAU	8 OPD	35.000.000,00
5	01	03	2.03	02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00
5	01	03	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya dokumen (RPJPD RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan	Bappeda	1 Dok	25.000.000,00	DAU	1 Dok	25.000.000,00
5	01	03	2.03	04	Amistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen PD bidang Kewilayahan yang diinisiasi	Bappeda	5 Dok	25.000.000,00	DAU	5 Dok	25.000.000,00
5	01	03	2.03	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitor dan dievaluasi Kewilayahannya	Bappeda	35 OPD	35.000.000,00	DAU	35 OPD	35.000.000,00
5	01	03	2.03	06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	1 Dok	110.000.000,00	DAU	1 Dok	110.000.000,00
5	01	03	2.03	07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					DAU		
5	01	03	2.03	08	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kajian bidang penelitian dan pengembangan	Bappeda	3 Dok	310.000.000,00	DAU	3 Dok	310.000.000,00
5	05				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	1 Dok	50.000.000,00	DAU	1 Dok	50.000.000,00
5	05	02			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Tersusunnya dokumen kajian penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappeda	1 Dok	50.000.000,00	DAU	1 Dok	50.000.000,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen kajian bidang sosial dan kependudukan		1 Dok	110.000.000,00	DAU	1 Dok	110.000.000,00
5	05	02	2.01	01	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan Pariwisata lokal	Bappeda	1 Dok	110.000.000,00	DAU	1 Dok	110.000.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan		3 Dok	150.000.000,00	DAU	3 Dok	150.000.000,00
5	05	02	2	05	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bappeda	1 Dok	50.000.000,00	DAU	1 Dok	50.000.000,00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda	1 Dok	50.000.000,00	DAU	1 Dok	50.000.000,00
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappeda	1 Dok	50.000.000,00	DAU	1 Dok	50.000.000,00
TOTAL								6.654.338.117				

Tabel 3.2
Rumusan Program dan Kegiatan Perubahan RENJA-PD Tahun 2022
Kabupaten Nias Selatan

Nama PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Perubahan RENJA-PD					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju	
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5												
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Bappeda	100%	1.964.449.495	APBD			
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Bappeda	11 Dok	35.342.285	APBD			
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	2 Dok	5.001.480	APBD		
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda	1 Dok	5.012.700	APBD		
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda	1 Dok	5.029.475	APBD		
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappeda	1 Dok	5.000.215	APBD		
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappeda	1 Dok	5.000.160	APBD		
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda	1 Dok	5.098.115	APBD		
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	4 Dok	5.200.140	APBD		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Bappeda	20 Dok	157.607.094	APBD		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	30 org/bulan	142.458.114	APBD		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	1 Dok	5.003.240	APBD		
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappeda	1 Dok	5.145.690	APBD		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bappeda	4 Lap	5.000.050	APBD		
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	0 Orang		APBD		
5	01	01	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappeda	0 Unit		APBD		
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bappeda	0 Paket		APBD		
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda	0 Org		APBD		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Bappeda	100%	1.312.024.316	APBD		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappeda	6 Paket	9.950.336	APBD		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda	18 Paket	199.957.193	APBD		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappeda	42 Paket	156.716.490	APBD		

Kode					Perubahan RENJA-PD					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju	
					Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda	4 Paket	36.471.859	APBD			
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappeda	12 Dok	15.000.000	APBD			
5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	12 Lap	17.820.000	APBD			
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	250 Lap	842.758.000	APBD			
5	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda	6 Dokumen	33.350.438	APBD			
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bappeda	100%	183.200.000	APBD			
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	460 Lap	5.000.000	APBD			
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda	12 Lap	15.000.000	APBD			
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda	12 Lap	163.200.000	APBD			
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Bappeda	38 unit	276.275.800	APBD			
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappeda	5 Unit	50.970.000	APBD			
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda	1 Unit	199.905.800	APBD			
5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda	32 Unit	25.400.000	APBD			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Bappeda			APBD			
5	01				PERENCANAAN		Bappeda			APBD			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	100%	261.246.120	APBD			
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	Bappeda	12 Dok	210.840.490	APBD			
5	01	02	2,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Bappeda	1 Dok	9.631.380	APBD			
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Bappeda	5 Dok	11.313.280	APBD			
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappeda	1 BA	31.780.730	APBD			
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappeda	35 BA	19.271.835	APBD			
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	1 BA	40.272.095	APBD			
5	01	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Bappeda	350 Usulan	16.488.560	APBD			

Kode					Perubahan RENJA-PD					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju	
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappeda	2 Dok	82.082.610	APBD			
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	100%	7.593.410	APBD			
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Bappeda	63 Orang	7.593.410	APBD			
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	5 Dok	42.812.220	APBD			
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda	1 Lap	15.863.540	APBD			
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda	4 Lap	26.948.680	APBD			
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	Bappeda	100%	153.241.795	APBD			
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	Bappeda	100%		APBD			
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	100%		APBD			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	8 Dok	43.736.810	APBD			
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	2 Dok	8.840.700	APBD			
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	5 PD	19.865.340	APBD			
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	1 Lap	15.030.770	APBD			
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	5 Dok	45.449.800	APBD			
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	2 Dok	13.380.950	APBD			
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Bappeda	1 Lap	7.285.080	APBD			
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	2 Dok	24.783.770	APBD			
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	8 Dok	64.055.185	APBD			
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	2 Dok	14.602.060	APBD			
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Bappeda	4 Lap	37.590.285	APBD			
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	2 Dok	11.862.840	APBD			

Kode				Perubahan RENJA-PD					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju	
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Bappeda			APBD			
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	Bappeda	5%	50.022.590	APBD			
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Bappeda	1 Dok	25.545.190	APBD			
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda	1 Dok	25.545.190	APBD		
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappeda	0 Dok		APBD		
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Bappeda	1 Dok	24.477.400	APBD			
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappeda	1 Dok	24.477.400	APBD		
TOTAL PAGU								2.428.960.000				

Tabel Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam Program RKPD

No	OPD Penanggung Jawab	Program RPJMD	No	Program RKPD	SKPD	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65	Semua OPD
2	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	
3	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	
5	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	
7	Kecamatan Amandraya	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	
8	Kecamatan Aramo	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	
9	Kecamatan Boronadu	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	
10	Kecamatan Fanayama	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1	
11	Kecamatan Gomo	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	
12	Kecamatan Hibala	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	
13	Kecamatan Hilimegai	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13	PROGRAM PENYELLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	
14	Kecamatan Hilisalawa***ah	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	
15	Kecamatan Huruna	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1	
16	Kecamatan Idanotae	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	
17	Kecamatan Lahusa	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERLUAN	1	
18	Kecamatan Lolomatua	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18	PROGRAM PENYELLENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	
19	Kecamatan Mazino	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19	PROGRAM PENYELLENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	
20	Kecamatan Mazo	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	
21	Kecamatan Onohazumba	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1	
22	Kecamatan Onolau	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	
23	Kecamatan O****O****U	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	
24	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	
25	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1	
26	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	
27	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	
28	Kecamatan Sidua***ori	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1	
29	Kecamatan Simuk	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	
30	Kecamatan Somambawa	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	
31	Kecamatan Susua	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	
32	Kecamatan Tanah Masa	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	
33	Kecamatan Teluk Dalam	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	
34	Kecamatan Toma	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33	Kecamatan
35	Kecamatan Uluidanotae	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	
36	Kecamatan Ulunoyo	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	
37	Kecamatan Ulususua	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESЕHATAN	1	
38	Kecamatan Umbunasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	
39	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	39	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	
40	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	40	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	
41	Dinas Peranaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	
42	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	42	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	
43	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	43	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	
44	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PEMBERTDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	
45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERTDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	45	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	
46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERTDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	46	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	
47	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESЕHATAN	47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	
48	Kecamatan Amandraya	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48	PROGRAM PENGAWSAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	
49	Kecamatan Aramo	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	
50	Kecamatan Boronadu	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHragaan	1	
51	Kecamatan Fanayama	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1	
52	Kecamatan Gomo	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	
53	Kecamatan Hibala	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	
54	Kecamatan Hilimegai	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	
55	Kecamatan Hilisalawa***ah	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1	
56	Kecamatan Huruna	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	
57	Kecamatan Idanotae	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	
58	Kecamatan Lahusa	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	
59	Kecamatan Lolomatua	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1	
60	Kecamatan Lolowau	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20	Kecamatan
61	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	
62	Kecamatan Maniamolo	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	
63	Kecamatan Mazino	PROGRAM PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESЕHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	

No	OPD Penanggung Jawab	Program RPJMD	No	Program RKPD	SKPD	Keterangan
64	Kecamatan Mazo	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	
65	Kecamatan Onohazumba	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	
66	Kecamatan Onolalu	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	
67	Kecamatan O****O****U	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1	
68	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	
69	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANOAN	1	
70	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	
71	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	
72	Kecamatan Sidua***ori	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	
73	Kecamatan Simuk	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	
74	Kecamatan Somambawa	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	
75	Kecamatan Susua	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	
76	Kecamatan Tanah Masa	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	76	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	
77	Kecamatan Teluk Dalam	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	77	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	
78	Kecamatan Toma	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	
79	Kecamatan Uluidanotae	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1	
80	Kecamatan Ulunoyo	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	
81	Kecamatan Ulususua	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10	Kecamatan
82	Kecamatan Umbunasi	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	82	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	
83	Dinas Sosial	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	83	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	
84	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	84	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	
85	Kecamatan Amandraya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	
86	Kecamatan Aramo	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	
87	Kecamatan Boronadu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	
88	Kecamatan Fanayama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	
89	Kecamatan Gomo	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	
90	Kecamatan Hibala	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	
91	Kecamatan Hilimegai	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	
92	Kecamatan Hilisalawa***ahe	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKUAN PENANAMAN MODAL	1	
93	Kecamatan Huruna	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	
94	Kecamatan Idanotae	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	
95	Kecamatan Lahusa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34	Kecamatan
96	Kecamatan Lolomatau	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	
97	Kecamatan Lolowau	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	
98	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	
99	Kecamatan Maniamolo	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	
100	Kecamatan Mazino	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	
101	Kecamatan Mazo	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	101	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	
102	Kecamatan Onohazumba	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	102	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	
103	Kecamatan Onolalu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	103	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	
104	Kecamatan O****O****U	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	104	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31	Kecamatan
105	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	
106	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	106	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	
107	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	107	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	
108	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	108	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	
109	Kecamatan Sidua***ori	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	
110	Kecamatan Simuk	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	
111	Kecamatan Somambawa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	111	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	
112	Kecamatan Susua	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	
113	Kecamatan Tanah Masa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	113	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	
114	Kecamatan Teluk Dalam	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	114	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	
115	Kecamatan Uluidanotae	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	115	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1	
116	Kecamatan Ulunoyo	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	116	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	
117	Kecamatan Ulususua	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	
118	Kecamatan Umbunasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Total Program RKPD		304	
119	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
120	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
121	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
122	Dinas Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
123	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
124	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
125	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Rumus :
(Jumlah program RKPD tahun berkenan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan) x 100%
(304 / 344) x 100% = 88%

No	OPD Penanggung Jawab	Program RPJMD	No	Program RKPD	SKPD	Keterangan
126	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
127	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
128	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
129	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
130	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA				
131	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
133	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
134	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
135	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
136	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
137	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
138	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
139	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
140	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
141	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
142	Dinas Perpustakaan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
143	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
146	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
147	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
148	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
149	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
150	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
151	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
152	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
153	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
154	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
155	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
156	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
157	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
159	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
160	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
162	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN				
163	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
164	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHARGA				
165	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
166	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
167	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
169	Badan Kependidikan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
170	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
171	Dinas Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
172	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
173	Dinas Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
174	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
175	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
176	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
177	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
178	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
179	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
180	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
181	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
182	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN				
183	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
184	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBITAN UMUM				
185	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
186	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
187	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				

No	OPD Penanggung Jawab	Program RPJMD	No	Program RKPD	SKPD	Keterangan
188	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
189	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
190	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
191	Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
192	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
193	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
194	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
195	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
196	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
197	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
198	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
199	Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
200	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
201	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
202	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
203	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
204	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
205	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
206	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
207	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
208	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
209	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
210	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
211	Dinas Perpustakaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
212	Dinas Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
213	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
214	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
215	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
216	Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
217	Kecamatan Amandraya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
218	Kecamatan Aramo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
219	Kecamatan Boronadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
220	Kecamatan Fanayama	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
221	Kecamatan Gomo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
222	Kecamatan Hibala	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
223	Kecamatan Hilimegai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
224	Kecamatan Hilisalawa""ahe	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
225	Kecamatan Huruna	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
226	Kecamatan Idanotae	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
227	Kecamatan Lahuza	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
228	Kecamatan Lolomatua	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
229	Kecamatan Lolowau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
230	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
231	Kecamatan Maniamolo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
232	Kecamatan Mazino	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	OPD Penanggung Jawab	Program RPJMD
233	Kecamatan Mazo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
234	Kecamatan Onohazumba	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
235	Kecamatan Onolalu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
236	Kecamatan O****O****U	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
237	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
238	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
239	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
240	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
241	Kecamatan Sidua***ori	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
242	Kecamatan Simuk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
243	Kecamatan Sombambwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
244	Kecamatan Susua	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
245	Kecamatan Tanah Masa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
246	Kecamatan Teluk Dalam	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
247	Kecamatan Toma	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
248	Kecamatan Uluidanotae	PROORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
249	Kecamatan Uluneyo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
250	Kecamatan Uliususua	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
251	Kecamatan Umbunasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
252	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
253	Dinas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
254	Dinas Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
256	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGRUKTAN JALAN (LLAJ)
257	Kecamatan Amandraya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
258	Kecamatan Aramo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
259	Kecamatan Boronadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
260	Kecamatan Fanayama	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
261	Kecamatan Gomo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
262	Kecamatan Hibala	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
263	Kecamatan Hilimegai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
264	Kecamatan Hiliyalawa***ahe	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
265	Kecamatan Huruna	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
266	Kecamatan Idanotae	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
267	Kecamatan Lahuza	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
268	Kecamatan Lolomatuia	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
269	Kecamatan Lolowau	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
270	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
271	Kecamatan Maniamolo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
272	Kecamatan Mazino	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
273	Kecamatan Mazo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
274	Kecamatan Onohazumba	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
275	Kecamatan Onolalu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
276	Kecamatan O****O****U	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
277	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
278	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
279	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
280	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
281	Kecamatan Sidua***ori	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
282	Kecamatan Simuk	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
283	Kecamatan Sombambwa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
284	Kecamatan Susua	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
285	Kecamatan Tanah Masa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
286	Kecamatan Teluk Dalam	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
287	Kecamatan Toma	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
288	Kecamatan Uluidanotae	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

No	Program RKPD	SKPD	Keterangan
----	--------------	------	------------

No	OPD Penanggung Jawab	Program RPJMD	No	Program RKPD	SKPD	Keterangan
289	Kecamatan Ulunoyo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
290	Kecamatan Ulususua	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
291	Kecamatan Umbunasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
292	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
293	Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
294	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
295	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
296	Kecamatan Amandraya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
297	Kecamatan Aramo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
298	Kecamatan Boroniadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
299	Kecamatan Fanayama	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
300	Kecamatan Gomo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
301	Kecamatan Hibala	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
302	Kecamatan Hilmegai	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
303	Kecamatan Hiliyalawa***ahe	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
304	Kecamatan Huruna	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
305	Kecamatan Idanotae	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
306	Kecamatan Lahuasa	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
307	Kecamatan Lolomatua	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
308	Kecamatan Lolowau	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
309	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
310	Kecamatan Maniamolo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
311	Kecamatan Mazino	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
312	Kecamatan Mazo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
313	Kecamatan Onohazumba	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
314	Kecamatan Onelatu	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
315	Kecamatan O****O****U	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
316	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
317	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
318	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
319	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
320	Kecamatan Sidua***ori	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
321	Kecamatan Simuk	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
322	Kecamatan Susua	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
323	Kecamatan Tanah Masa	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
324	Kecamatan Teluk Dalam	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
325	Kecamatan Toma	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
326	Kecamatan Uluidanotae	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
327	Kecamatan Ulunoyo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
328	Kecamatan Ulususua	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
329	Kecamatan Umbunasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
330	Dinas Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
331	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
332	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
333	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
334	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
335	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
336	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
337	Dinas Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
338	Dinas Perpustakaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
339	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
340	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
341	Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
342	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
343	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
344	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				

2182	7.01.0.0.0.00.34.0000 Kecamatan Uluandanotae	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan / Reabilitasi Sistem dan Prasarana Gedung Kantor	0
2183	7.01.0.0.0.00.34.0000 Kecamatan Uluandanotae	7.01.02.2.01.01 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1
2184	7.01.0.0.0.00.34.0000 Kecamatan Uluandanotae	7.01.05.2.01.06 Pengembangan Kehidupan Demokratis berdasarkan Perencanaan	63.679.400
2185	7.01.0.0.0.00.34.0000 Kecamatan Uluandanotae	7.01.06.2.01.01 Faillitas Perencanaan Peraturan, Desa dan Peraturan Kepala Desa	0
2186	7.01.0.0.0.00.34.0000 Kecamatan Uluandanotae	7.01.06.2.01.02 Faillitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0
2187	7.01.0.0.0.00.34.0000 Kecamatan Uluandanotae	7.01.06.2.01.03 Faillitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	8.358.000
2188	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.01 Penyiapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
2189	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perubahan RKA-SKPD	1.739.600
2190	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perubahan DPA-SKPD	1.739.600
2191	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Perencanaan dan Pengembangan DPA-SKPD	1.739.600
2192	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Perencanaan dan Pengembangan DPA-SKPD	1.739.600
2193	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Iktisadiyah	1.739.600
2194	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.01.17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.739.600
2195	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.02.01 Perendian Gaji dan Tunjangan ASN	24.500.000
2196	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.02.02 Koordinasi dan Perencanaan, Laporan Keuangan, Adhir Tahun SKPD	0
2197	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Perencanaan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan	0
2198	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.018.800
2199	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.123.000
2200	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.06.08 Faillitas Komunitas Tamu	21.700.000
2201	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.06.09 Penyiapan Raport Koordinasi dan Komunikasi SKPD	179.150.000
2202	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	7.249.600
2203	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
2204	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000
2205	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.01.2.09.09 Penelihirhan / Reabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
2206	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.01 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah	16.683.000
2207	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.03 Perangkat dan Perkiraan Pengeluaran Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	0
2208	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.04 Pengembangan Kebudayaan dan Budaya, Belig dan Pengembangan Tokoh Agama dan Tokoh Masanya	0
2209	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.05 Pengembangan dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	17.753.600
2210	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.06 Faillitas Administrasi Tata Pemerintahan dan Pendayagunaan Aset Daerah	4.779.800
2211	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.07 Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	0
2212	7.01.0.0.0.00.35.0000 Kecamatan Idarotae	7.01.02.2.01.11 Faillitas Perrelevegaraan Ketenteraman dan Kerohanian Umum	0
2213	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.01 Penyiapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.017.300
2214	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	7.000.200
2215	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Organisasi Perubahan RKA-SKPD	0
2216	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD	7.144.500
2217	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Perencanaan Perubahan DPA-SKPD	0
2218	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisadiyah	7.554.500
2219	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
2220	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01.08 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.520.350
2221	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.02.04 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0
2222	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.001.700
2223	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Organisasi Perubahan RKA-SKPD	5.820.000
2224	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Perencanaan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan	7.442.000
2225	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.02.08 Penyiapan dan Analisa Prognosis Risiko dan Anggaran	0
2226	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.03.01 Penyiapan Perencanaan Kebutuhan Barisan Milik Daerah SKPD	0
2227	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.03.06 Penyiapan Barisan Milik Daerah pada SKPD	10.009.800
2228	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.05.02 Pengabdian Pakuan Dinas berserta Atribut Kelerakapsennya	37.398.000
2229	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaarkan Tugas dan Fungsi	75.832.000
2230	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.05.10 Socialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0
2231	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.01 Penyiapan Komponen Intiatalan Listrik / Penyediaan Bengunan K	5.022.000
2232	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Perlakuan dan Perlengkapan Kantor	24.165.000
2233	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.285.750
2234	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	54.475.500
2235	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan	0
2236	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.07 Faillitas Kunungan Tamu	20.915.000
2237	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06.08 Penyiapan Raport Koordinasi dan Komunikasi SKPD	378.520.000
2238	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.07.01 Penyiapan Kondisi Ferromagnetis Dinas atau Kendaraan Dinas J	0
2239	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.07.02 Penyiapan Komponen Dinas untuk Dikirim atau Lantaran	0
2240	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.07.11 Pengabdian Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	0
2241	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.08.01 Persevian Jasa Surat Menyurat	15.000.000
2242	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.08.02 Persevian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0
2243	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.09.01 Persevian Jasa Penelihiran, Biaya Penelihiran, Biaya Pajak	55.120.000
2244	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.09.02 Persevian Jasa Penelihiran, Biaya Penelihiran, Biaya Pajak dan Pn	0
2245	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.09.03 Persevian Jasa dan Prasarana Pendukung Gedung	45.000.000
2246	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.21.01 Penyiapan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	514.657.000
2247	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	0
2248	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	0
2249	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Buds	1.630.321.500
2250	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya	152.685.500
2251	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01.01 Penyiapan Program Kerja di Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial	1.457.771.400
2252	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial	84.185.000
2253	8.01.0.0.0.00.01.0000 Badan Keustauan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.G1.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewa	64.926.000

Penilaian :

Jumlah Sub Kesiapan Diri pencapaikan
Jumlah Sub Kesiapan Kesiapan dilaksanakan

2353
1515
67%

Badan Perencanaan Peningkatan Derajat (Bappeda) Kabupaten Nias Selatan

No	Sektor	Kode	Unit/Badan/Biro/Kantor/Divisi/Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sosial	Institusi/Objektif Program/Proyek/Jadwal	Tujujuan/Riwayat/Kelebihan/Kelemahan	Rahasia/Catatan Khusus	Pengalaman dan Pengalaman Biaya (2022) yang di evaluasi	Rahasia/Catatan Khusus dan Anggaran Biaya yang diperlukan	Rahasia/Catatan Khusus dan Anggaran Biaya yang diperlukan	Tujujuan/Catatan Khusus dan Rencana Biaya (2022) yang di evaluasi	Rahasia/Catatan Khusus dan Anggaran Biaya yang diperlukan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	3	1	4.05.02.2.03.2.05	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	1. Reabilitasi dan Pengembangan Jaringan Internet dan Peningkatan Keterhubungan Antara Organisasi 2. Pengembangan Pelayanan Umum	1. Dok. Rp. 50.000.000,00	- Dok.	-	-	-	-
2	2	2	2	5.05.02.2.03.2.05	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	1. Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3. Dok. 1.000.000.000	- Dok.	-	-	-	-
3	2	2	2	5.05.02.2.03.2.05	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	3. Dok. 510.945.348	- Lep.	1. Lep.	24.477.400	-	1	34.620.438
4	2	2	2	5.05.02.2.04.2.04	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	4. Dok. 1.570.2227.3	- Lep.	1. Lep.	24.477.400	1	36.630.000	100%
5	2	2	2	5.05.02.2.04.2.04	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	5. Dok. 17.901.511.85	- Lep.	-	-	-	-	35.130.030
6	2	2	2	5.05.02.2.04.2.04	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	6. Dok. 17.901.511.85	- Lep.	-	-	-	-	35.130.030
7	2	2	2	5.05.02.2.04.2.04	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	7. Dok. 2.312.576.442	-	-	-	-	-	2.312.576.442
8	2	2	2	5.05.02.2.04.2.04	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Pengembangan Inovasi	8. Dok. 277.5.220.000	-	-	-	-	-	277.5.220.000

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Program 1.5.0.4 277.5.220.000												
Total Biaya Realisasi Dari Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Tujujuan												
Biaya												

1. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas dan kerjasama antar ahli dan ahli
 Komunitas
 2. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas
 3. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas
 4. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas
 5. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas
 6. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas
 7. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas
 8. Untuk mendukung pelaksanaan program
 Komunitas

*) Data calon Nasabah Biaya

1. Ciri kewajiban dan

2. Ciri kewajiban dan

3. Ciri kewajiban dan

4. Ciri kewajiban dan

5. Ciri kewajiban dan

6. Ciri kewajiban dan

7. Ciri kewajiban dan

8. Ciri kewajiban dan

9. Ciri kewajiban dan

10. Ciri kewajiban dan

11. Ciri kewajiban dan

12. Ciri kewajiban dan

13. Ciri kewajiban dan

14. Ciri kewajiban dan

15. Ciri kewajiban dan

16. Ciri kewajiban dan

17. Ciri kewajiban dan

18. Ciri kewajiban dan

19. Ciri kewajiban dan

20. Ciri kewajiban dan

21. Ciri kewajiban dan

22. Ciri kewajiban dan

23. Ciri kewajiban dan

24. Ciri kewajiban dan

25. Ciri kewajiban dan

26. Ciri kewajiban dan

27. Ciri kewajiban dan

28. Ciri kewajiban dan

29. Ciri kewajiban dan

30. Ciri kewajiban dan

31. Ciri kewajiban dan

32. Ciri kewajiban dan

33. Ciri kewajiban dan

34. Ciri kewajiban dan

35. Ciri kewajiban dan

36. Ciri kewajiban dan

37. Ciri kewajiban dan

38. Ciri kewajiban dan

39. Ciri kewajiban dan



TABEL
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
BAPPEDA KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Target Capaian 2022	Capaian Sampai Triwulan IV Tahun 2022
1	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	62	74	80	88%
2	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	%	58	83	70	67%
3	Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	%	4	4	10	19%
4	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	%	50	50	55	73,60%
5	Persentase implementasi rencana kelitbang	%	n/a	n/a	100	100

TABEL CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.045.837.462	2.040.003.542	99,71%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.342.285	35.342.285	100,00%
5.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.001.480	5.001.480	100,00%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.012.700	5.012.700	100,00%
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.029.475	5.029.475	100,00%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.215	5.000.215	100,00%
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.160	5.000.160	100,00%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5.098.115	5.098.115	100,00%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.140	5.200.140	100,00%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158.315.350	156.548.980	98,88%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.166.370	141.400.000	98,77%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.003.240	5.003.240	100,00%
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	5.145.690	5.145.690	100,00%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.050	5.000.050	100,00%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.385.404.027	1.385.000.968	99,97%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.950.336	9.950.310	100,00%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.957.193	199.945.633	99,99%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.645.701	180.641.450	100,00%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.182.359	42.181.590	100,00%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	100,00%
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.820.000	17.820.000	100,00%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.498.000	886.123.913	99,96%
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.350.438	33.338.072	99,96%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.200.000	179.803.745	98,15%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.541.000	90,82%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	12.062.745	80,42%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000	163.200.000	100,00%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.575.800	283.307.564	99,91%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.970.000	50.754.864	99,58%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.905.800	199.852.700	99,97%
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.700.000	32.700.000	100,00%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	269.246.120	269.158.685	99,97%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	218.840.490	218.753.055	99,96%
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	9.631.380	9.631.380	100,00%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	11.313.280	11.313.280	100,00%
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	31.780.730	31.776.330	99,99%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	19.271.835	19.271.835	100,00%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	40.272.095	40.272.095	100,00%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	16.488.560	16.488.560	100,00%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	90.082.610	89.999.575	99,91%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.593.410	7.593.410	100,00%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	7.593.410	7.593.410	100,00%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	42.812.220	42.812.220	100,00%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	15.863.540	15.863.540	100,00%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26.948.680	26.948.680	100,00%
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	153.166.952	153.036.710	99,91%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	43.707.610	43.642.195	99,85%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.840.700	8.840.700	100,00%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.865.340	19.818.625	99,76%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.001.570	14.982.870	99,88%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	45.449.800	45.388.200	99,86%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.380.950	13.380.950	100,00%
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	7.285.080	7.285.080	100,00%
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.783.770	24.722.170	99,75%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	64.009.542	64.006.315	99,99%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.602.060	14.602.060	100,00%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	37.544.642	37.541.415	99,99%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.862.840	11.862.840	100,00%
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	61.422.590	61.337.485	99,86%
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25.545.190	25.506.855	99,85%
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	25.545.190	25.506.855	99,85%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	35.877.400	35.830.630	99,87%
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	35.877.400	35.830.630	99,87%
TOTAL		2.529.673.124	2.523.536.422	99,76%

Teluk Dalam, 03 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Nias Selatan,



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TUJUAN /SASARAN I		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET(TRIWULAN)			
						1	II	III	IV
Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Nilai LakiP			CC		CC			
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis			20%				20%	
	Persentase SOP yang diterapkan			100%		25%	25%	25%	25%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cukupnya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	2.045.837.462					
2	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	35.342.285						
3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.001.480	Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dengan berpedoman pada Rensira 2021 - 2026					
4	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.012.700	Menyusun Dokumen RKA-SKPD dengan mempedomani plafon anggaran yang telah disepakati, mencantumkan sumber dana, lokasi kegiatan, capaian program					
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.029.475	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD mempedomani plafon anggaran yang telah disepakati, mencantumkan sumber dana, lokasi kegiatan, capaian program					
6	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	5.000.215	Menyusun dan menceetak DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	5.000.160	Menyusun dan menceetak Perubahann DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD					
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Ong/Bln	143.166.370	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.003.240	Menyiapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan CALK				
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	5.145.690	Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Lap	5.000.050	Menyediakan dokumen persediaan barang dan bukti-bukti pembayaran pajak bulan berkenan				

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah		100	%	1.385.404,027
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan	6 Paket	9.950,336	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	✓ ✓ ✓ ✓
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	199.957,193	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	✓ ✓ ✓ ✓
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	180.645,701	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan makanan serta minuman rapat	✓ ✓ ✓ ✓
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.182,359	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	✓ ✓ ✓ ✓
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	15.000,000	Menyediakan bahan bacaan berupa koran dan majalah	✓ ✓ ✓ ✓
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	17.820,000	Memfasilitasi setiap tamu yang berkunjung di Bappeda maupun luar daerah	✓ ✓ ✓ ✓
7	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Lap	886.498,000	Melakukan rapat dan koordinasi baik di dalam daerah maupun luar daerah	✓ ✓ ✓ ✓
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dok	33.350,438	Mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SIPD dan Aplikasi Krishna DAK)	✓ ✓ ✓ ✓
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	183.200,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menjurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menjurat	460 Lap	5.000,000	Menyediakan materai dan benda pos lainnya	✓ ✓ ✓ ✓
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15.000,000	Menyediakan jasa internet setiap bulan (indihome)	✓ ✓ ✓ ✓
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	163.200,000	Menyediakan jasa pelayanan umum kantor	✓ ✓ ✓ ✓
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	38 Unit	283.575,800		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.970,000	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	✓ ✓ ✓ ✓
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.905,800	Melakukan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	✓ ✓ ✓ ✓
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	32.700,000	Memelihara sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	✓ ✓ ✓ ✓
		Total		2.045.837,462		

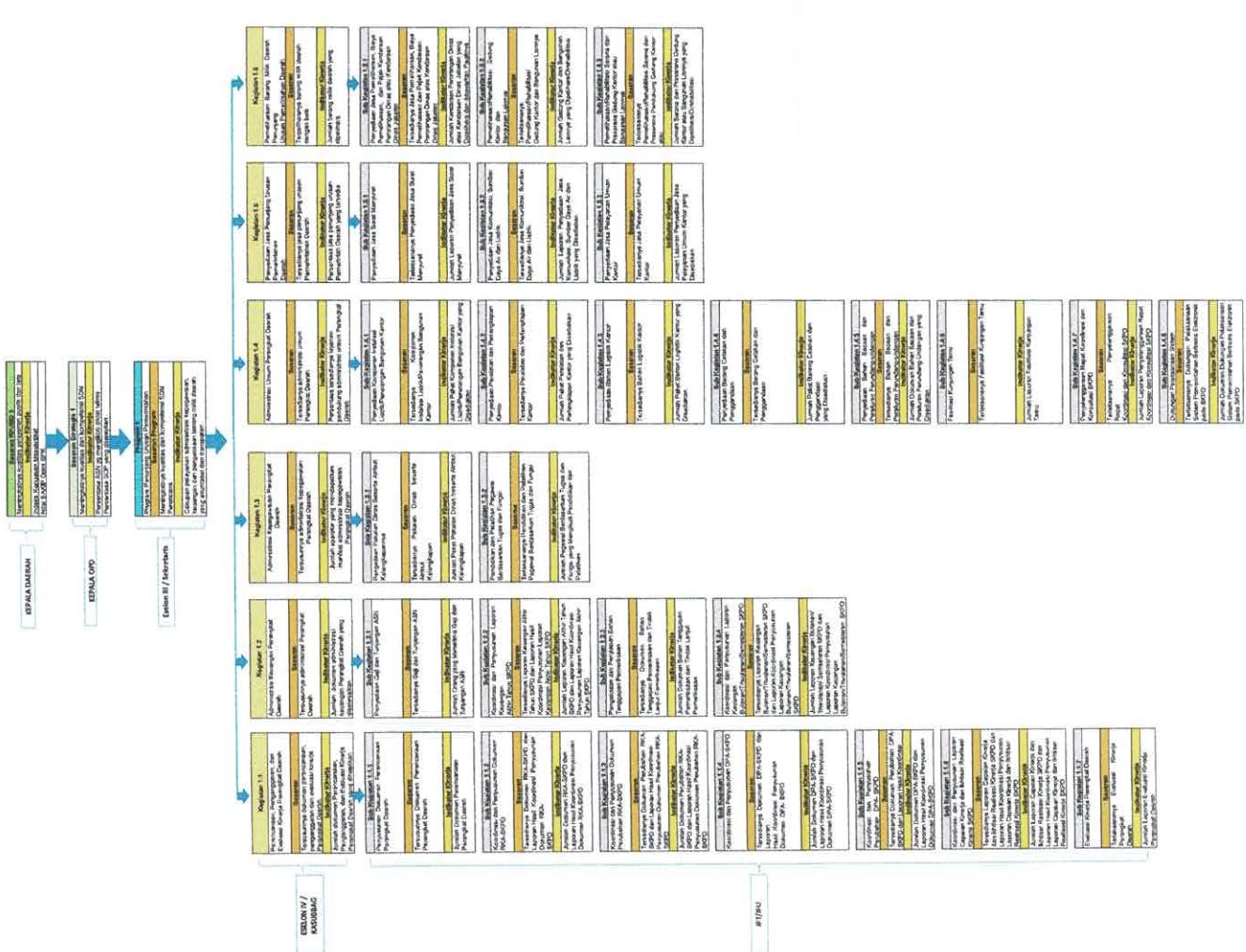
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET (TRIWULAN)			
				I	II	III	IV
1	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	80%		80%		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	70%		70%		
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	10%		10%		
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	50%		50%		
JADWAL PELAKSANAAN							
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	
						I	II
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	268.246.120			
	Penyusutan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	12 Dok	218.840.490			
1	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	9.631.380	Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah		
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dok	11.313.280	Menelaah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (dok RKPD, RKPD PROV, RPJPD,RPJMD,RTRW)		
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	31.780.730	Melaksanakan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2023 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Nias Selatan		
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	19.271.835	Melaksanakan forum SKPD/Lintas SKPD bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Nias Selatan		
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	40.272.095	Melaksanakan musrenbang Kabupaten/Kota bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Selatan		
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350 Usulan	16.488.560	Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan musrenbang kecamatan		
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dok	90.082.610	Menyusun dan menetapkan dokumen RKPD dan Perubahannya		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	7.593.410			
1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Orang	7.593.410	Melakukan sosialisasi penginputan dokumen Renstra dan Renja ke dalam aplikasi SiIPD		
	Perencanaan Pembangunan SKPD						

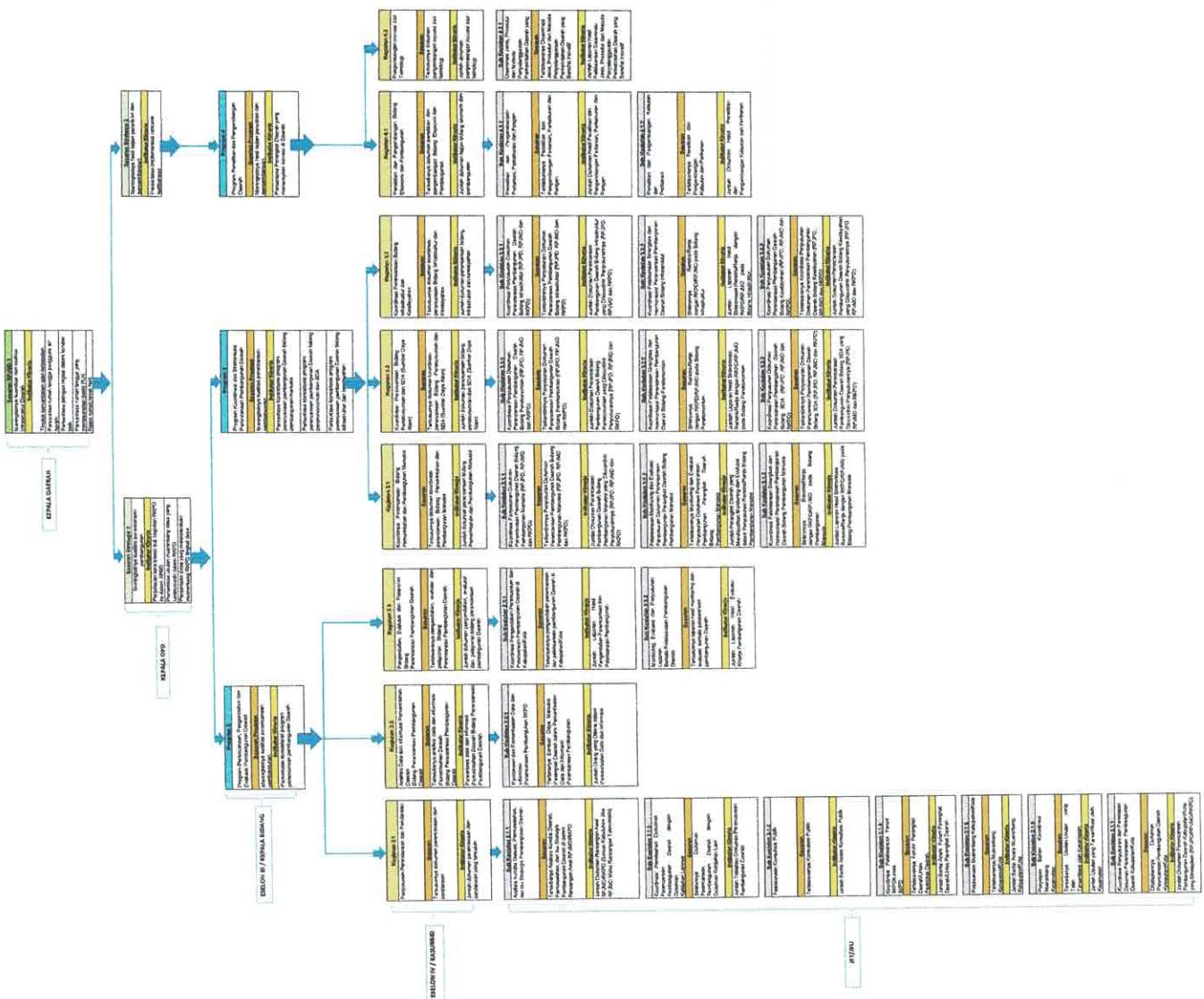
Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah		5	Dok	42.812.220
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap	15.863.540	Menyusun laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Lap	26.948.680	Melakukan monitoring dan menyusun hasil Evaluasi kinerja pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia		100	%	153.166.952
Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan		100	%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		8	Dok	43.707.610
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	2	Dok	8.840.700	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia
2	Perikamanan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5	PD	19.865.340	Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sirkonisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia RKPDRP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Lap	15.001.570	Menyusun laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD bidang pembangunan manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		5	Dok	45.449.800
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	2	Dok	13.380.950	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan perekonomian
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sirkonisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Perekonomian	1	Lap	7.285.080	Menyusun laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD bidang perekonomian
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	2	Dok	24.783.770	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		8	Dok	64.009.542
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	2	Dok	14.602.060	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sirkonisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Infrastruktur	4	Lap	37.544.642	Menyusun laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD bidang infrastruktur
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	2	Dok	11.862.040	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan
						422.413.072
		Total II				

SASARAN III		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				TARGET(TRWULAN)			
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	Target	RENCANA AKSI	RENCANA AKSI	Target	I	II	III	IV
Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan		Percentase implementasi rencana kelitbangam				100%	50%	50%	50%	50%	50%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		JADWAL PELAKSANAAN									
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		RENCANA AKSI									
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan									
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pengembangan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dok	25.545.190						
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1	Dok	25.545.190	Menyusun kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Menyusun kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	✓	✓	✓	✓
1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Dok	35.877.400	Menyusun kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Menyusun kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	✓	✓	✓	✓
Total III		Total I + II + III			61.422.590						
Total I + II + III		Total I + II + III			2.529.673.124						

Telukdalam, 17 Oktober 2022
 Kepala Dinas Nias Selatan

 Abelie Sonasa Amazilipond, SSTP, M.Ed.Dev
 PEjabat
 NIP. 198308262001121 002







DAFTAR ASN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KABUPATEN NIAS SELATAN TA.2022

No	Nama / Nip.	Gol / Ruang	Jabatan
1	Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP, M.Ec. Dev NIP. 19830826 200112 1 002	Pembina IV/a	Kepala Bappeda
Sekretariat / Bagian Umum			
2	Desman Hulu, ST NIP. 19791223 201001 1 019	Penata TK.I III/d	Sekretaris Bappeda
3	Wellman Kristian Ndruru, S.IP NIP. 19800102 200502 1 001	Penata III/c	Kasubbag Umum & Kepegawaian Bappeda
4	Seksama Wau, A.Md NIP. 19740529 200611 1 001	Penata III/c	Kasubbag Keuangan Bappeda
5	Suartini Manao, A.Md NIP. 19820414 201101 2 005	Penata Muda III/a	Plt. Kasubbag Program Bappeda
6	Budisama Gaurifa NIP. 19770727 200611 1 001	Pengatur TK.I II/d	Pengadministrasi Umum Bappeda
7	Rosaswita Halawa NIP. 19860506 200701 2 001	Pengatur II/c	Bendahara Bappeda
8	Dasanak Maduwu NIP. 19860611 201410 1 001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum Bappeda
Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup			
9	Ipedeni Sarumaha, ST NIP. 19830904 201001 1 015	Penata TK.I III/d	Kabid Sarana Prasarana Wilayah & Lingk.Hidup Bappeda
10	Bonifasius Laia, S.Pd, M.A Nip. 19850603 201101 1 003	Penata TK.I III/d	Kasubbid Pengembangan Wilayah, Perhubungan & Pertanahan Bappeda
11	Alex Mardiman Nehe, SE Nip. 19870323 201101 1 001	Penata III/c	Kasubbid Pekerjaan Umum & Permukiman Bappeda
12	Ampuni Sarumaha, S.IP, MM Nip. 19790622 200611 1 001	Penata III/c	Kasubbid SDA & Lingkungan Hidup Bapp
13	Eva Mekar Sari Hawa NIP. 19800406 200906 2 001	Pengatur TK.I II/d	Pengadministrasi Umum Bappeda
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan			
14	Albert Sifaodododa Dakhi, S.Kom NIP. 19820426 201402 1 001	Penata III/c	Kabid Kesejahteraan Rakyat & Pemerintahan Bappeda
15	Osara'o Tafonao, ST NIP. 19770227 201001 1 006	Penata TK.I III/d	Kasubbid Sosial & Budaya Bappeda
16	Darius Nifakhoiziduhu Hondro, SE NIP. 19880906 201903 1 005	Penata Muda III/a	Plt. Kasubbid Pendidikan Bappeda
17	Monika Setiani Gulo, ST NIP. 19950217 201903 2 021	Penata Muda III/a	Plt. Kasubbid Pemerintahan Bappeda
Bidang Perekonomian			
18	Palmarum Dachi, ST NIP. 19791217 201101 1 001	Penata III/c	Kabid Perekonomian Bappeda
19	Setia Graha Tuhosaro Dachi, S.Pi NIP. 19830729 201001 1 010	Penata TK.I III/d	Kasubbid Pertanian Bappeda
20	Amirahi Ziraluo NIP. 19650128 199003 1 007	Penata muda TK.I III/b	Plt. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Bappeda
21	Ewaldoni Lase, ST NIP. 19950531 201903 1 007	Penata muda III/a	Plt. Kasubbid Pariwisata & Penanaman Modal Bappeda
22	Suryani Zega, SE NIP. 19950330 202203 2 010	Penata muda III/a	Analis Perekonomian Bappeda
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
23	Petrus Felisianus Gaho, S.Pd, M.A.P NIP. 19830605 200903 1 010	Penata Tk. I III/d	Kabid Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda
24	Adusmen Manao, S.Kep.Ns NIP. 19900108 201505 1 001	Penata Muda TK.I III/b	Kasubbid Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bappeda
25	Oktavianus Boy Sukardin Jaya Wau, SE NIP. 19871025 201903 1 008	Penata muda III/a	Plt. Kasubbid Perencanaan & Pendanaan Bappeda
26	Ahmad Syukri Siregar, ST NIP. 19921031 201903 1 008	Penata Muda III/a	Plt. Kasubbid Data & Informasi Bappeda
Bidang Penelitian dan Pengembangan			
27	Rahmat Yan Putra Lase, SSTP.,MAP NIP. 19860121 200602 1 002	Penata Tk. I III/d	Kabid Penelitian & Pengembangan Bappeda
28	Yuniar Mawarni Hulu, S. Pd NIP. 19860628 201101 2 002	Penata Tk. I III/d	Kasubbid Litbang Ekonomi & Pembangunan Bappeda
29	Dies Putra Susanto Harefa, S.Psi NIP. 19881129 201101 1 001	Penata III/c	Kasubbid Litbang Pemerintahan, Sosial Budaya & Kemasyarakatan Bappeda

No	Nama / Nip.	Gol / Ruang	Jabatan
30	Erwin P. Juliper Manurung, ST NIP. 19950704 201903 1 005	Penata Muda III/a	Plt. Kasubbid Litbang SDA & Teknologi Bappeda

Lampiran Foto Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2022



Rapat penyusunan kamus usulan musrenbang RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023



Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2022



Koordinasi Pelaksanaan Forum OPD



Koordinasi dan sinkronisasi Renja PD Tahun 2022 (Dinas Pertanian)



Sosialisasi penginputan Renja Tahun 2022 pada aplikasi SIPD



Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur



*Rapat identifikasi pengembangan inovasi daerah Bersama
Kementerian Dalam Negeri*